

EDUCATION AND GENDER

Asri Yuni Vikasari¹, Anis Fauzi²

^{1,2} UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten

asriyunikivika@gmail.com, anisfauzi@uinbanten.ac.id

Abstrak

Pendidikan berperspektif gender merupakan usaha menyamakan perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak, peran, tanggung jawab dan ruang aktivitas dalam kehidupan sosial. Pandangan masyarakat umumnya kedudukan perempuan dibawah kekuasaan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah kualitatif, penulis menggali informasi secara mendalam mengenai Pendidikan dan gender. Pendekatan yang digunakan adalah studi Pustaka atau *library research*. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pendidikan berperspektif gender, faktor penyebab ketidaksetaraan gender dan upaya kesetaraan gender dalam dunia Pendidikan.

Kata kunci: Pendidikan, Gender, Kesetaraan gender

Abstract

Education with a gender perspective is an effort to equalize women and men in fulfilling their rights, roles, responsibilities and activities in social life. In general, the view of society is that women are under the power of men in social life. The method used in writing this article is qualitative, the author explores in-depth information about education and gender. The approach used is library research or library research. Writing this article aims to explain the concept of education with a gender perspective, the causes of gender inequality and gender equality efforts in the world of education.

Keywords: Education, Gender, Gender Equality

PENDAHULUAN

Pendidikan berperspektif gender merupakan usaha menyamakan perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak, peran, tanggung jawab dan ruang aktivitas dalam kehidupan sosial. Kesetaraan dan keadilan merupakan gagasan dasar, misi dan tujuan utama dalam peradaban manusia untuk mencapai keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, membangun keluarga yang berkualitas dan mencapai kesejahteraan. (Sumar n.d.)

Ketidaksetaraan mengakibatkan ketimpangan gender yang melahirkan sumber daya manusia menjadi rendah sehingga rendah pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pandangan masyarakat umumnya kedudukan perempuan dibawah kekuasaan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat merupakan tindakan subordinasi bertentangan dengan hakikat manusia. Menomorduakan kepentingan perempuan dalam menempuh Pendidikan menjadi terbatas, karena dalam pandangan masyarakat ekonomi rendah bahwa perempuan terlahir hanya untuk mengurus rumah tangga ataupun menjadi buruh. Persamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan maupun haknya sebagai manusia sehingga mampu berpartisipasi dan ikut berperan dalam berbagai kegiatan ekonomi, politik, pertahanan, social budaya dan keamanan nasional. (Saiful, 2014), Pemerintah memberikan kebebasan hak pendidikan kepada warga negara tanpa melihat dari sisi distingsi. Semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama. (Sulistiyowati, 2020)

Kesetaraan gender dalam dunia Pendidikan maupun dunia kerja menggunakan konsep keadilan gender, berjalan sejajar dan harmonis antara perempuan maupun laki-laki dengan memperhatikan kebutuhan maupun kepentingan gender yang berbeda. Diskriminasi yang terjadi pada perempuan didasari dengan tingkat keberadaan atau posisi perempuan sebagai warga kelas dua. (Abdullah dalam Ida Bagus Gede Paramita STAHN Mpu Kuturan Singaraja, 2020)

Perempuan memiliki peran ganda dalam kehidupannya, mereka dituntut untuk mengurus rumah tangga dan anak serta mampu bekerja. Bentuk marginalisasi seperti memprioritaskan promosi jabatan untuk laki-laki sehingga perempuan dipandang tidak mampu menjadi pemimpin ataupun bekerja setara dengan laki-laki. Menekankan perbedaan dalam visibilitas keberhasilan untuk kerja disiplin yang diwakili oleh perempuan yang menyebabkan kurangnya pengakuan kemampuan manajemen dalam kasus perempuan dan, akibatnya, perkembangan yang lebih lambat dalam karir mereka dibandingkan dengan laki-laki (O'leary dalam Santos-Jaén 2022). Seharusnya pada setiap bidang pekerjaan didasari oleh hak asasi manusia dengan tidak membedakan gender. Perempuan yang memiliki profesi perlu mendapatkan hak yang sama dan perlindungan kerja yang sama dengan kaum pria. (Junaidi n.d.)

Oleh karena itu perlunya kesadaran untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan maupun anak agar mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam memajukan Pendidikan dunia. Dalam konteks sejarah ditemukan diberbagai wilayah di Eropa dan Asia pada masa pro-Islam munculnya kesadaran gender yang dipicu oleh tindakan pejorative. Dimana praktik-praktik diskriminasi terhadap perempuan menjadi titik terang setelah adanya pengakuan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan yang dijelaskan oleh Islam di dalam teks Al-Qur'an dan Hadits. (Abidin, 2015)

Perempuan dipandang sebagai manusia yang lemah dan tidak memiliki kekuatan, sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pelecehan seksual maupun kekerasan fisik di dalam Lembaga Pendidikan. Kesetaraan gender harus dilakukan di dalam Lembaga Pendidikan di Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini karena kebutuhan perempuan berbeda dengan laki-laki, maka kebijakan dan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung bagi perempuan akan sangat membantu tidak hanya dalam keseharian mereka selama belajar maupun bekerja namun juga bisa menunjang hasil belajar atau kinerja mereka dilingkungannya (Indriyany, Hikmawan, and Utami 2021)

Tersosialisasinya gender berawal dari pengaruh lingkungan keluarga maupun pada Lembaga Pendidikan. Dalam proses sosialisai tersebut tentunya banyak tantangan yang akan dihadapi dan membutuhkan banyak cara yang harus ditempuh. Untuk itu, kiranya kepada pihak-pihak yang berkompeten di bidang sosialisasi gender ini hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk menggeser nilai-nilai budaya yang mendiskreditkan perempuan. (Rosilawati n.d.).

Penelitian yang dilakukan dengan 14 guru Kelas 7e12 Kanada yang telah mengajar tentang kekerasan berbasis gender (GBV) dituntut di dalam kelas mereka sejalan dengan kurikulum resmi di lima provinsi. Isu-isu GBV yang diajarkan termasuk persetujuan, budaya pemerkosaan, maskulinitas beracun, kekerasan seksual, perempuan dan anak perempuan Pribumi yang hilang dan dibunuh, kekerasan dalam rumah tangga, intimidasi homofobik, pembantaian Ecole Polytechnique, pembunuhan demi kehormatan, GBV terhadap laki-laki dan anak laki-laki, dan perdagangan seks (Vanner, Holloway, and Almanssori 2022)

Diatas penjelasan mengenai isu yang diangkat dalam kesetaraan gender. Berdasarkan paparan diatas maka penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang hakikat kesetaraan gender, factor penyebab ketidaksetaraan gender, dampak ketidakadilan gender dan upaya mewujudkan pendidikan berwawasan gender.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah kualitatif, penulis menggali informasi secara mendalam mengenai Pendidikan dan gender. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka atau *library research*. Penulis memperoleh informasi yang bersumber dari artikel jurnal Nasional maupun Internasional mengenai Pendidikan dan gender. Dengan dilakukannya studi kepustakaan ini penulis memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, luas dan mendalam mengenai topik pembahasan, memperoleh landasan teori yang kuat serta memperluas pandangan dan sudut pandang mengenai topik Pendidikan dan gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pendidikan Berspektif Gender

Kunci dalam mewujudkan keadilan gender di masyarakat yaitu dengan mentransfer norma-norma, pengetahuan dan ketrampilan. Di dalam Lembaga Pendidikan menjadi sarana formal untuk mensosialisasikan serta membekali akan adanya kesadaran atas nilai dan norma-norma gender yang berlaku di masyarakat. Untuk itu sejak awal perlu diupayakan terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan (Mursidah dalam Achmad 2019). Pernyataan ini melihat dari segi fungsi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan norma gender. Gender dan kesetaraan gender adalah satu kesatuan ide atau paham yang tidak dapat dipisahkan. Dalam bidang Pendidikan, kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan maupun hak-haknya sebagai manusia agar ikut berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan seperti ekonomi, politik, social budaya, keamanan nasional, pertahanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan (Saiful, 2014).

Di dalam Pasal 48 UUD Republik Indonesia 1945 menjelaskan bahwa “Wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”. Sedangkan pada Pasal 49 UUD Republik Indonesia 1945 membahas tentang: (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut dapat dipahami bahwa baik laki -laki maupun perempuan tidak dibedakan dalam kesempatan memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam jenjang Pendidikan dan mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan profesi atau pekerjaannya.

Adapun kedudukan dan peranan perempuan yang tertuang dalam Tap MPR No IV/1999 tentang GBHN yaitu: a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupannya berbangsa dan bernegara melalui kebijakan nasional yang diemban oleh lembaga yang mampu memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan

gender b. Meningkatkan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan serta historis perjuangan kaum perempuan dalam rangka melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Dataset kami mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa wanita melakukan lebih banyak transaksi daripada pria. (Talipsepp and Tänav 2021)

Teori gender menganalisis mengenai aspek social, psikologis identitas, budaya, ekspresi dan peran gender. Bermula pada pemahaman bahwa gender ditentukan bukan secara biologis tetapi secara social yang dibangun berdasarkan interaksi, norma-norma budaya, konteks historis dan hubungan kekuasaan. Teori ini diperoleh dengan cara dipahami, dirasakan dan dialami oleh individu maupun komunitas dalam pembentukan struktur social dan dinamika kekuasaan. Teori gender mempengaruhi perubahan social dan politik yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan gender. Praktisi wanita dan praktisi yang lebih berpengalaman menunjukkan tingkat optimisme dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. (Gonzalez-Igual, Corzo Santamaria, and Rua Vieites 2021)

Berikut beberapa macam faktor kesenjangan gender dalam dunia Pendidikan (Mursidah, dalam Achmad 2019):

1. Marginalisasi, yaitu proses dimana individu atau kelompok mengalami tekanan, peminggiran dan diabaikan oleh kekuasaan yang lebih kuat. Sehingga individu atau kelompok tersebut kehilangan hak, kekuasaan, peran dan akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama dengan masyarakat yang lain. Contoh dalam memperoleh akses Pendidikan, Ketika anak perempuan tidak mendapat kesempatan untuk mendapat Pendidikan yang tinggi karena berpandangan bahwa perempuan akan Kembali ke dapur. Sedangkan yang terjadi dalam lingkungan kerja, promosi jabatan yang memprioritaskan laki-laki karena berkeyakinan bahwa manajemen laki-laki lebih baik daripada perempuan. dengan latar belakang Pendidikan perempuan yang rendah maka sector pekerjaan yang dia ambil dengan upah yang rendah.

2. Subordinasi atau penomorduaan, kondisi dimana individu atau kelompok memiliki status yang lebih lemah atau lebih rendah dibandingkan dengan individu atau kelompok yang lain dalam hirarki politik ataupun social. Sebagai contoh dalam memperoleh hak Pendidikan yang terjadi pada keluarga ekonomi rendah, maka hak Pendidikan akan lebih memprioritaskan anak laki-laki daripada anak perempuan. hal yang terjadi adalah menempatkan peran dan kedudukan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

3. Stereotipe, adalah gambaran atau pandangan umum yang tidak sesuai dengan kenyataan, bersifat pelabelan negative atau meremehkan yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu. Tindakan ini mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang sehingga menimbulkan ketidakadilan, penindasan dan diskriminasi. Stereotipe dapat terjadi melalui pengalaman pribadi, media atau pengaruh social budaya. Contohnya Ketika perempuan menjalankan tugas dan fungsi pada pekerjaan domestic atau kegiatan rumah tangga, dengan melabeli kaum perempuan sebagai “ibu rumah tangga” kurang bermanfaat, ataupun menganggap pengahsilan perempuan cenderung tidak diperhitungkan sebagai tambahan atau sambilan.

4. Violence atau kekerasan, tindakan fisik maupun non fisik yang dapat membahayakan, melukai dan merugikan individu atau kelompok seperti kekerasan fisik, seksual, ekonomi, psikologis atau kekerasan terhadap hak asasi manusia. Kekerasan ini terjadi disebabkan karena konflik, ketidaksetaraan dan perbedaan pandangan dalam masyarakat dan berdampak jangka Panjang terhadap Kesehatan fisik dan mental pada korban.

5. Beban ganda, kondisi dimana salah satu jenis kelamin dalam keluarga mengalami beban, tanggungjawab atau tuntutan yang lebih berat atau dua kali lipat. Beban ganda yang biasanya terjadi pada perempuan yang harus memenuhi tuntutan peran ganda yaitu sebagai ibu dan pekerja profesional atau sebagai pengasuh keluarga dan penopang ekonomi keluarga. Beban ganda sering terjadi pada masyarakat ekonomi rendah, dimana beban ganda ini dapat mengakibatkan stress, kelelahan mental dan fisik atau gangguan kesehatan lainnya.

Faktor Penyebab Ketidaksetaraan Gender

Faktor penyebab munculnya ketidaksetaraan gender dalam dunia Pendidikan menurut Arief Rahman dalam (Natasha et al. n.d.) sebagai berikut:

1. Kultur yang memomorduakan perempuan atau misogini

Pandangan atau praktik social yang mengekang atau merendahkan martabat dan hak perempuan serta melebih-lebihkan nilai laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan ini dapat menghambat perempuan dalam mencapai potensi mereka di berbagai bidang Pendidikan, politik dan ekonomi.

2. Sistem struktur sekolah kurang memberikan kesempatan pada perempuan

Masyarakat berpendapat bahwa perempuan tidak mendapat akses Pendidikan yang tinggi, karena menyebabkan virus yang mengganggu system struktur sekolah.

3. Lemahnya kesetaraan gender

Meskipun ada kemajuan di beberapa bidang tertentu, namun perwakilan dari perempuan kurang seimbang dan masih ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam mewakili di beberapa bidang ilmu tertentu, sehingga mempengaruhi pilihan karir perempuan dalam seleksi masuk.

4. Manajemen rumah tangga belum seimbang

Keinginan perempuan untuk melanjutkan jenjang Pendidikan atau mengembangkan kompetensi pada dirinya menjadi terbatas dan mengganggu bahwa hanya perempuan yang harus mengurus rumah tangga, padahal laki-laki juga dibutuhkan peran untuk membantu pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak.

5. Kesepakatan pasangan yang melemahkan perempuan

Kesepakatan yang diputuskan oleh salah satu pihak sebelum atau setelah menikah yaitu pihak laki-laki yang membatasi ruang gerak dan kemandirian untuk berkembang pada perempuan. Prinsip seperti ini yang menyebabkan persoalan kesetaraan gender yang harus diatasi tidak hanya sisi kultural namun pada juga perlu kebijakan dalam struktur.

Upaya Meningkatkan Pendidikan Berwawasan Gender

Untuk mewujudkan keadilan gender tentu diperlukan berbagai upaya yang harus dilaksanakan. Pada Lembaga Pendidikan terutama perlu mengambil langkah dengan merumuskan kebijakan gender dalam Pendidikan Nasional. Pemahaman guru Kanada dengan meningkatkan kesadaran kritis siswa mengenai GBV, dan bagaimana guru mengalami proses pedagogis, dengan memperluas pengajaran tentang GBV dengan memberikan pengetahuan yang akan membantu guru mengatasi masalah ini secara lebih efektif di kelas mereka. (Vanner et al. 2022)

Kepala sekolah selaku pembuat kebijakan mengajak para staf karyawan, guru dan seluruh siswa untuk bersama-sama mewujudkan sekolah yang berwawasan gender. Kepala sekolah terbuka dalam menerima saran yang diberikan dari staf karyawan dan guru. Di dalam Lembaga Pendidikan pun perlu transparan dalam pembagian posisi dan peran dalam struktur organisasi sekolah dengan tidak merendahkan salah satu jenis

kelamin. Melalui kebijakan itu agar tercapainya tujuan sebagai berikut: (1) Membuka kesempatan pendidikan secara merata di semua jenis, jurusan dan tingkat Pendidikan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. (2) Mengeliminasi berbagai macam kesenjangan gender pada bidang kejuruan di tingkat Pendidikan sehingga keadilan gender merata di berbagai bidang keahlian. (3) Memberi peluang dan kesempatan pada perempuan untuk ikut berperan dan partisipasi secara optimal di semua unit dan tahapan pembangunan Pendidikan yang meliputi perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program hingga evaluasi. (Iswah Adriana dalam Achmad 2019).

Selain itu strategi dalam menjalankan kebijakan keadilan gender antara lain::

1. Menyediakan akses Pendidikan yang bermutu secara merata bagi semua jenis kelamin baik anak laki-laki maupun perempuan.
2. Menyediakan akses Pendidikan kesetaraan untuk penduduk usia dewasa yang tidak mendapat kesempatan mengikuti Pendidikan sekolah.
3. Meningkatkan penyedia layanan baca tulis untuk meningkatkan derajat yaitu melek huruf, terutama kaum perempuan.
4. Meningkatkan koordinasi, informasi dan edukasi mengenai Pendidikan yang berwawasan gender.
5. Mengembangkan kelembagaan institusi Pendidikan baik daerah maupun pusat mengenai Pendidikan berwawasan gender. (Natasha et al. n.d.)

Seluruh pihak baik lembaga pendidikan, pemerintah maupun masyarakat perlu meningkatkan pendidikan yang berwawasan gender karena dengan pemahaman siswa dalam kesetaraan gender dapat meminimalkan diskriminasi gender, meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, menghasilkan manusia yang responsive dan toleransi terhadap perbedaan gender dan mampu meningkatkan kualitas Pendidikan dengan membangun pemahaman yang lebih luas mengenai peran gender.

KESIMPULAN

Pendidikan berperspektif gender adalah usaha menyamakan perempuan dan laki-laki dalam pemenuhan hak, peran, tanggung jawab dan ruang aktivitas dalam kehidupan sosial. Dari pandangan tersebut pendidikan berwawasan gender, baik di sekolah dan Lembaga Pendidikan dipandang sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan norma gender, sekaligus sebagai tempat mewujudkan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya khususnya dalam bidang pendidikan. Ketidakadilan gender terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu: Marginalisasi atau peminggiran, Subordinasi atau penomorduuan, Stereotipe atau pelabelan negative, Violence atau serangan fisik, Beban Ganda atau ditanggung satu jenis kelamin tertentu secara berlebihan. Faktor penyebab munculnya ketidaksetaraan gender dalam dunia Pendidikan yaitu (1) Kultur yang menomorduakan perempuan atau misogini, (2) Sistem struktur sekolah kurang memberikan kesempatan pada perempuan, (3) Lemahnya kesetaraan gender, (4) Manajemen rumah tangga belum seimbang, (5) Kesepakatan pasangan yang melemahkan perempuan. Upaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam dunia Pendidikan adalah dengan mengintegrasikan Pendidikan perspektif gender ke dalam kurikulum dan pembelajaran di sekolah, serta memberi pelatihan terhadap tenaga pendidik mengenai Pendidikan berwawasan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Saiful, A., 2014. Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender. *Jurnal At-Ta'dib* , 9(2), pp. 199-224.

- Achmad, Syaefudin. 2019. 'YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak Membangun Pendidikan Berwawasan Gender'. doi: 10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp70-91.
- Gonzalez-Igual, Manuel, Teresa Corzo Santamaria, and Antonio Rua Vieites. 2021. 'Impact of Education, Age and Gender on Investor's Sentiment: A Survey of Practitioners9'. *Heliyon* 7(3). doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e06495.
- Indriyani, Ika Arinia, M. Dian Hikmawan, and Wahyu Kartiko Utami. 2021. 'Gender Dan Pendidikan Tinggi: Studi Tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender'. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(1):55–72. doi: 10.14710/jiip.v6i1.9376.
- Inovasi Penelitian, Jurnal, and Oleh Ida Bagus Gede Paramita STAHN Mpu Kuturan Singaraja. 2020. 'PENDIDIKAN ETIKA DAN GENDER DALAM TEKS SATUA I TUUNG KUNING'. 1(2).
- Junaidi, Mahbub. n.d. 'PENDIDIKAN MULTIKULTULAR DAN PENDIDIKAN INKLUSI GENDER'.
- Natasha, Harum, Fakultas Tarbiyah, Dan Keguruan, Universitas Islam, Negeri Sultan, and Syarif Kasim Riau. n.d. *KETIDAKSETARAAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN: FAKTOR PENYEBAB, DAMPAK, DAN SOLUSI*.
- Santos-Jaén, José Manuel, Patricia P. Iglesias-Sánchez, and Carmen Jambrino-Maldonado. 2022. 'The Role of Gender and Connections between Entrepreneurship and Employability in Higher Education'. *International Journal of Management Education* 20(3). doi: 10.1016/j.ijme.2022.100708.
- Sumar, Warni Tune. n.d. *IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN*.
- Talpsepp, Tõnn, and Anne Liis Tänav. 2021. 'Do Gender, Age and Education Affect Herding in the Real Estate Market?' *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 32. doi: 10.1016/j.jbef.2021.100571.
- Vanner, Catherine, Allison Holloway, and Salsabel Almanssori. 2022. 'Teaching and Learning with Power and Privilege: Student and Teacher Identity in Education about Gender-Based Violence'. *Teaching and Teacher Education* 116. doi: 10.1016/j.tate.2022.103755.
- Ika Indriyani, D. H. W. U., 2021. Gender dan Pendidikan Tinggi Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), p. 17.
- Rosilawati, A., 2015. Perempuan dan Pendidikan Refleksi atas pendidikan Berperspektif Gender. *Jurnal iain pontianak*, p. 8.

Abidin, Z., 2015. Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Tarbiyah*, 12(1), p. 16.

Sulistyowati, Y., 2020. Kesetaraan Gender dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *Indonesia Journal of Gender Studies*, 1(2), p. 9.